LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu. LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 disusun dengan prinsip kejujuran, obyektif dan transparan yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, masukan dari *stakeholder* sangat diharapkan. Akhir kata, semoga LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup baik serta dapat menjadi referensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang.

Bengkulu, Februari 2023 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu,

ERDIWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19680714 199303 1 005

DAFTAR ISI

Kata	Per	ngantar	ii
Dafta	r Is	i	iii
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Dasar Hukum	1
	C.	Gambaran Organisasi	2
	D.	Sistematika Penulisan	9
BAB I	I PI	ERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A.	Perencanaan Strategis	10
	В.	Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja	18
BAB I	II A	KUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
	A.	Pencapaian Kinerja Sasaran	27
	В.	Rekomendasi	36
	C.	Akuntabilitas Keuangan	37
BAB I	V P	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	38
	В.	Saran-saran	38

Lampiran:

- 1. Rekapitulasi Capaian Kinerja masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan PK Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Sub Koordinator)
- 2. Rekapitulasi Capaian Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 diharapkan dapat :

- Mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2. Menjadi masukan dan umpan baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;
- Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah-Implikasinya terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor 800/1837/B.5/2021 Tentang Pelaksanaan
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkunga Pemerintah Provinsi Bengkulu.

C. Gambaran Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu serta kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 3) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- 4) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 5) Penetapan hasil penilaian kesehatan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 6) Pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 7) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;;
- Pengkoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 9) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 10) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- 11) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Bengkulu.

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, diuraikan dan didistribusikan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, mengidentifikasi produk hukum daerah serta menginventarisasi permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas kesekretariatan;

- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e) Pelayanan informasi publik di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f) Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
- Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- h) Penghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi kepala dinas;
- i) Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

2) Bidang Perizinan Dan Kelembagaan

Bidang Perizinan Dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi data, dokumen perizinan dan pembentukan serta pembubaran Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam. Kepala Bidang Perizinan Dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi yang akurat;

- d) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang akurat;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
- g) Pengkoordinasian pembentukan Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
- h) Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan Laporan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- i) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- j) Menghadiri rapat teknis di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan disposisi atasan;
- k) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
 dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan serta penerapan sanksi bagi Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam. Kepala Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- c) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- d) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- f) Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- g) Pengkoordinasian penyediaan data kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- h) Pengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i) Menghadiri rapat teknis Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- j) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- k) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; *dan*
- I) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, memperluas akses permodalan, mempromosikan dan melakukan perlindungan terhadap usaha koperasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d) Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- e) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- g) Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

- h) Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- i) Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- j) Menghadiri rapat teknis Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- k) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- I) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, mempromosikan dan membuka akses pasar bagi produk usaha kecil, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

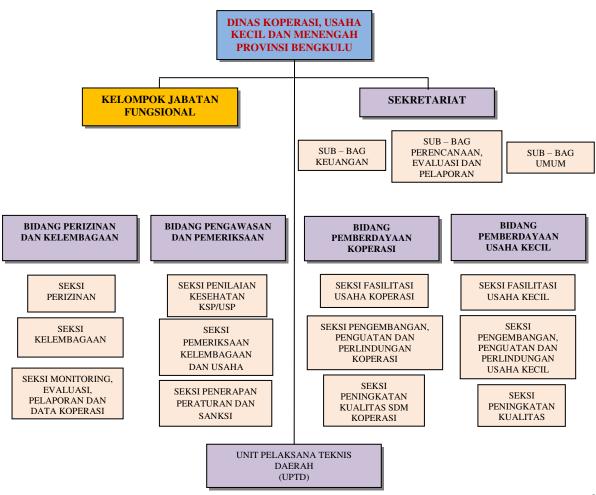
- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- c) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- d) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- f) Pengkoordinasian pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- g) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h) Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- i) Menghadiri rapat teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- j) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- k) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- I) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Disamping tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang tersebut diatas, maka untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Pada Dinas KUKM Provinsi Bengkulu, ditetapkan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu:

- UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu;
- 2) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu.

Secara ringkas Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada **Gambar 1.1.** dibawah ini.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu



D. Sistematika Penulisan

Adapun Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 adalah:

BABI : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan perencanaan kinerja yang digariskan didalam RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan arah kebijakan program. Selain itu juga menyajikan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menjelaskan capaian kinerja sasaran yang diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur meliputi Perjanjian Kinerja tahun 2022 minimal Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu juga pada bab ini menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu tahun 2022, baik APBN maupun APBD.

BABIV: PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih periode 2021-2024 tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, adalah "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat". Pemahaman Bengkulu sejahtera, dan hebat adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan. Bengkulu yang maju makna Mewujudkan Infrastruktur strategis dan pemerataan mengandung infrastruktur dasar yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip – prinsip pembangunan dan berintegritas menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan Provinsi-provinsi maju di Indonesia. Bengkulu sejahtera mengandung makna mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan serta kebijakan permbangunan yang adil serta kemudahan akses dengan landasan keimanan dan ketaqwaan. Bengkulu Hebat mengandung makna Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan yang kooperatif yang didukung dengan kebijakan dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki,optimisme dan percaya diri masyarakat berintegritas serta martabat, mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam membangun SDM maupun Infrastruktur.

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Hebat, Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan 5 (lima) misi yaitu:

Misi Pertama: Membangun ekonomi dan Infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan infrastruktur di Bengkulu, akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif. Pembangunan Infrastruktur Strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, Jalan dan Jembatan sebagai akses penghubung kawasan produksi dengan kawasan distribusi, meningkatkan akses menuju kawasan Pariwisata, pemantapan Infrastruktur Dasar, bertujuan memberikan nilai tambah secara ekonomi, dan memacu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengandalkan potensi daerah.

Misi Kedua: Mewujudkan pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar – besarnya bagi kesejahteraan

Misi ini bertujuan untuk Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (disasterpreparedness). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga: Memperkuat Kelembagaan pemerintah, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, professional serta transformasi pelayanan publik

Misi ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dengan tetap mengedapankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efekif dan efesien. Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efesiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintah serta zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis , terbuka, responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas serta didukungan dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.

Misi Keempat: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing,dan berbudaya, toleransi dan religius

Misi ini bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil beradab budaya, menguasi teknologi, berkarakter, sejahterah sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan Manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman,nyaman, dan mengimplentasikan nilai nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religious dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagamaan, kebhinekaan dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi Kelima: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi ini bertujuan untuk memberikan akses kontrol bagi Perempuan—perempuan di Provinsi Bengkulu yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan Gender dapat dicapai. Selain itu Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak, untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang

secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan.

Dari kelima misi diatas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu melaksanakan misi Pertama yaitu "Membangun ekonomi dan Infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif". Selain misi diatas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu juga turut mendukung Delapan Belas Program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu salah satunya mengembangkan industri kreatif.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel 2.1.1** dibawah ini.

Tabel 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

VISI

Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

MISI Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (*Good and Clean Government*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	 Menyediakan Jasa Surat Menyurat; Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik; Menyediakan Jasa Administrasi Keuangan; Menyediakan Alat Tulis Kantor; Menyediakan Barang Cetakan Dan Penggandaan Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Menyediakan Peralatan Rumah Tangga Menyediakan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Melaksanakan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Menyediakan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur	 Menyediakan Perlengkapan Gedung Kantor Menyediakan Peralatan Gedung Kantor Menyediakan Meubeler Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Gedung Kantor Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Melaksanakan Pembangunan Pagar Gedung Kantor Melaksanakan Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Kantor
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1) Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal
Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1) Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan 2) Melaksanakan Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang Milik Negara

MISI I

Membangun Ekonomi dan Infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Sektor		Meningkatkan Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Melaksanakan Penatusahaan Kelembagaan Koperasi Penyelenggarakan Perizinan Dan Pembentukan Badan Hukum Koperasi Meningkatkan Dan Mengembangkan Data Koperasi Meningkatkan Kualitas Dan Kesehatan KSP/USP Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP Melaksanakan Rekomendasi Pengawasan Dan Rehabilitasi KSP/USP
Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi Modern	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Website dan Sistem Informasi Koperasi dan UKM Melaksanakan Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Melaksanakan Penyusunan Profil Koperasi dan UMKM Peningkatkan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Dan UKM Mengembangkan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Koperasi Meningkatkan Kemampuan Teknis Pelaku KUKM

Meningkatnya Kualitas UMKM Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertranformasi dari Informal ke Formal Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertranformasi dari Informal ke Formal Meningkatkan Pendataan dan Izin usaha UMKM Mengembangkan Digitalisasi Produk dan UMKM Meningkatkan fungsi Rumah Kreatif PLUT sebagai Ekosistem Ekonomi Kreatif UMKM Mengembangkan Desain dan Teknologi Produk UMKM		Meningkatkan Pertumbuhan Omzet UMKM	2) M Kl 3) M Pe da 4) M Te 5) M Pe	Melaksanakan Promosi Produk Usaha ecil Menengah Meningkatkan Perluasan Pemanfaatan UR/UMI Bagi UMKM Melaksanakan Pembinaan Dan engembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil an Menengah Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan eknis Bidang UMKM Meningkatkan Sarana Dan Prasarana endidikan Dan Pelatihan UMKM Meningkatkan Skala Usaha dari Mikro ke ecil
	Meningkatnya Kualitas UMKM	Mikro yang Bertranformasi dari	2) M Kr (P 3) M UI 4) M UI 5) M see 6) M	usat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Ilengembangkan UMKM melalui Rumah reatif Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT) Ileningkatkan Pendataan dan Izin usaha MKM Ilengembangkan Digitalisasi Produk dan MKM Ileningkatkan fungsi Rumah Kreatif PLUT Pbagai Ekosistem Ekonomi Kreatif UMKM Ilengembangkan Desain dan Teknologi

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Adapun Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Esselon II, III dan IV (Sub Koordinator) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

Tahun Anggaran : 2022

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM dalam Mendukung	Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB	5,7%
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB		5,7%
		Kontribusi Sektor Koperasi terhadap PDRB	5,2%
		Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	20%
1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	8,0%
		Pertumbuhan Koperasi Modern	0,2%
1.2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	3%
		Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%
2	Tujuan/ Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sasaran: Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Government)	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	BB

 Jumlah Anggaran (APBD) Tahun 2022
 : Rp. 19,139,828,209,

 Jumlah Anggaran (APBN) Tahun 2022
 : Rp. 4,622,797,000,

Bengkulu, 26 Januari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua GUBERNUR BENGKULU

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Provinsi Bengkulu

ERDIWAN, SH. M.SI

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

18

			PERJANJIAN KINERJA ESSELO	ON III		
Nama	Instansi	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu			
Tahun	Anggaran	: 2022				
Bidan	g	: Kepala Bidang Perizinan Dan	Kelembagaan			
No		Sasaran Bidang	Indikator Outcome	Target	Program	Pagu
1	Meningkatr Simpan Pinj	nya Pelayanan Izin Usaha jam Binaan Provinsi	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	80%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	200.000.000
			Ben	gkulu, Januari	2022	
		Pihak Kedua		Pihak Pertama		
		ERDIWAN, SH, M. Si	ABI	DULLAH WAZIR, SE,	M.Si	
		Pembina Utama Madya NIP. 19680714 199303 1 005	NIP.	Pembina Tk. I 19650203 199503	1 003	

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan	Menengah Provinsi Bengkulu			
Jabata	an	: Kepala Bidang Pemberdayaan K	operasi			
Tahur	n Anggaran	: 2022				
No		Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
1	Terlaksanar Perlindunga		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	100%	550.000.000
				Ben	gkulu, Januari 2	022
		Pihak Kedua			Pihak Pertama	
		ERDIWAN, SH, M. Si		DEI	DDY ERLANDO, SP. N	<u>//M</u>
		Pembina Utama Madya			Pembina	
		NIP. 19680714 199303 1 005		NIP.	19710203 200312 1	003

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Da	n Menengah Provinsi Bengkulu			
Jabata	abatan : Kepala Bidang Pemberdayaan		Usaha Kecil			
Tahur	Anggaran	: 2022				
No		Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
1		nya Pendampingan dan aan Usaha Menengah, Usaha saha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil Dan Mikro (UMKM)	Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,2%	2.075.000.000
				Ben	gkulu,	2022
		Pihak Kedua			Pihak Pertama	
		ERDIWAN, SH, M. Si		[Drs. TARMIZI MALII	<u>(1</u>
		Pembina Utama Madya			Pembina Tk. I	
		NIP. 19680714 199303 1 005		NIP.	19650701 199102 1	1 001

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Be	ngkulu			
Jabata	n	: Kepala Bidang Pengawasan D	an Pemeriksaan				
Tahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Program	Program	1	Indikator Program	Target	Anggaran
1	Terlaksanar Pengawasa	nya Pemeriksaan dan n Koperasi Binaan Provinsi	Program Pengawasan o Koperasi	lan Pemeriksaan	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan Provinsi	100%	250.000.000
		Pihak Kedua			Beng	kulu, Pihak Pertama	2022
		ERDIWAN, SH, M. Si Pembina Utama Madya				RUSTAM, SH. M.Si	
		NIP. 19680714 199303 1 005			NIP.	19721023 199703	1 004

OPD/L	Jnit Kerja Mandiri	: Dinas Koperasi, Usaha I	Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	n	: Sekretaris					
Tahun	Anggaran	: 2022					
No	Sasar	an Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	
1	Terlaksananya Keş Pemerintahan Dae		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	11.468.105.866	
		Ť					
				Bengkulu,	2022		
		Pihak I	Kedua	Pihak I	Pertama		
		Kepala Dinas Koperasi, Us	aha Kecil Dan Menengah	Sekretaris			
		Provinsi E	Bengkulu				
	ERDIWAN, SH. M.Si			DEDY CANDRA, S.STP. M.AP			
		Pembina Uta	ama Madya	Pen	nbina		
		NIP. 19680714	199303 1 005	NIP. 1980050	9 199810 1 001		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Ber	igkulu			
Jabata	an	: Kepala UPTD Balai Latihan KU	KM				
Tahur	n Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Program	Program		Indikator Program	Target	Anggaran
1		nya Pendidikan dan Pelatihan naan Provinsi dan UMKM	Program Pendidikan Perkoperasian	dan Latihan	Persentase Koperasi Binaan Provinsi dan UMKM yang di didik dan di latih	100%	2.952.964.000
					Beng	kulu, Januari	2022
		Pihak Kedua				Pihak Pertama	
		ERDIWAN, SH, M. Si			IVANA KI	JSUMANINGTYAS	S, SE. MM
		Pembina Utama Madya				Pembina	
		NIP. 19680714 199303 1 005			NIP. 1	19770908 200312	2 003

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu			
Jabata	n	: Kepala UPTD PLUT - KUMKM				
Tahun	Anggaran	: 2022				
No		Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Anggaran
1	Terlaksanan Binaan Pusa	iya Pengembangan UMKM it Layanan Usaha Terpadu	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu	15%	1.675.000.000
				Beng	kulu,	2022
		Pihak Kedua			Pihak Pertama	
		ERDIWAN, SH, M. Si		<u>EU</u>	DA RAKHMAWATI,	SH
		Pembina Utama Madya			Pembina	
		NIP. 19680714 199303 1 005		NIP.	19661215 199403	2 006

				PERJ <i>A</i>	ANJIAN KINERJA ESSEI	ON IV			
OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Da	an Menengah Provinsi Re	engkulu					
bata		: Pengawas Muda	in wichengam rovinsi be	iigkuiu					
		: 2022							
No		Sasaran Kegiatan	Kegia	tan	Indikator Kegiata	n	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	Wilayah Ke	jam untuk Koperasi dengan eanggotaan Lintas Daerah		dengan Wilayah ntas Daerah			Penyiapan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam		
		Pihak Kedua					Bengkulu, Februa Pihak Pertama	ari 2022	
		ABDULLAH WAZIR, SE, M.Si					Titin Kristin Astuti, S	iIP_	
		Pembina Tk. I NIP. 19650203 199503 1 003					Penata TK.I NIP. 19800602 200604		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Prov	vinsi Bengkulu						
Jabata	in	: Pengawas Muda								
Tahun	Anggaran	: 2022								
No		Sasaran Kegiatan	H	Kegiatan		Inc	likator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	Wilayah k	iya Penerbitan Izin Usaha ijam untuk Koperasi dengan keanggotaan Lintas Daerah Kota dalam 1 (Satu) Daerah	untuk Koperas Keanggotaan	i dengan W Lintas D	/ilayah Daerah	Simpan Pinjam	elayanan Perizir Binaan Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 rekomendasi	-
								Bengkulu, Februari 2022		
		Pihak Kedua						Pihak Pertama		
		ABDULLAH WAZIR, SE, M.Si						LUKMAN HAKIM, S.Sos		
		Pembina Tk. I						Penata Tk. I		
		NIP. 19650203 199503 1 003						NIP. 19680201 199901 1 001		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu						
labata	an	: Pengawas Muda							
Tahur	Anggaran	: 2022							
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan		Indikator Kegiatan		Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	Simpan Pir Wilayah I	njam untuk Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah	Penerbitan Izin Usaha Simpan untuk Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Wilayah Daerah	h Simpan Pinjam Binaan Provinsi h	Usaha	Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi	15 rekomendasi	
		Pihak Kedua					Bengkulu, Februari 2022 Pihak Pertama		
		ABDULLAH WAZIR, SE, M.Si					HERI DENTI, SH, MH		
		Pembina Tk. I NIP. 19650203 199503 1 003					Pembina NIP. 19680806 198811 2 001		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provi	nsi Bengkulu					
abata	an	: Pengawas Muda							
Гаhun	Anggaran	: 2022							
No		Sasaran Kegiatan	Ke	egiatan		Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	Perlindungar keanggotaar	ya Pemberdayaan dan n Koperasi yang nya lintas Daerah Kab./Kota u) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Koperasi yang k Daerah Kab./Kota Provinsi	keanggotaannya	lintas	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang diberdayakan dan dilindungi	Peluasan akses Pasar , Akses Pembiayaan ,Penataan Manajemen , Standarisasi , dan Restrukturisasi Usaha	15 Koperasi	
							Beng	gkulu, Februari	2022
		Pihak Kedua						Pihak Pertama	
		DEDDY ERLANDO, SP. MM						ADE ANDRIATI, SE	
		Pembina						Penata Tk I	
		NIP. 19710203 200312 1 003					NIP	.19660710 199103 2	007

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
labata	an	: Pengawas Muda					
Tahur	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	Perlindunga keanggotaa	nn Koperasi yang nnya lintas Daerah Kab./Kota	,	n Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang s diberdayakan dan dilindungi n	Fasilitasi usaha koperasi	15 Koperasi	
					Beng	gkulu, Februari	2022
		Pihak Kedua				Pihak Pertama	
		DEDDY ERLANDO, SP. MM			HE	LDHA FEBRINA NUR	, SE
		Pembina				Penata Tk. I	
		NIP. 19710203 200312 1 003			NIP.	19870217 201101	2 003

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Prov	vinsi Bengkı	ılu				
abata	n	: Pengawas Muda							
ahun	Anggaran	: 2022							
No		Sasaran Kegiatan	H	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	yang Pendataan,k n,Penguatan	ya Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui kemitraan,Kemudahan,Perijina n Kelembagaan dan Koordinasi n Pemangku Kepentingan	dilakukan melalu Kemudahan I	i Pendataa Perijinan, Koordinas	n, Kemitraan, Penguatan		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Persentase Kemiskinan	200 UMKM	
		Pihak Kedua				В	Bengkulu, Februari 202 Pihak Pertama	2	
		Drs. TARMIZI M Pembina Tk. I NIP. 19650701 199102 1 001					CHAIRIL MISWAN, SE Penata Tk. I NIP.19670605 199303 1 008		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	in	: Pengawas Muda					
Tahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	yang Pendataan,I n,Penguatar	Kemitraan,Kemudahan,Perijina n Kelembagaan dan Koordinasi	dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,		Perencanaan Pengembangan kewirausahaan	200 UMKM	-
		Pihak Kedua			Bengkulu, Februari 2022 Pihak Pertama		
		<u>Drs. TARMIZI M</u> Pembina Tk. I			PEKA HARYANI, SE Penata TK. I		
		NIP. 19650701 199102 1 001			NIP. 19810706 200502 2 001		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	an	: Pengawas Muda					
Tahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	yang Pendataan, n,Penguatai	Kemitraan,Kemudahan,Perijina	dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,	,	Pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil	200 UMKM	
		Pihak Kedua			Bengkulu, Maret 2021 Pihak Pertama		
		<u>Drs. TARMIZI M</u> Pembina Tk. I NIP. 19650701 199102 1 001			SUSI ROSETA, SE Penata Tk. I NIP. 19791222 200804 2 001		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	in	: Pengawas Muda					
Tahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terlaksanar Pengawasai Keanggotaa Kabupaten/ Provinsi	, n Koperasi yang Wilayah nnya Lintas Daerah Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah		Meningkatnya Akuntabilitasi, Kepercayaan, Ke patuhan, Kesinambungan, an Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan Masyarakat	15 Koperasi	-
		·					
		Pihak Kedua			Bengkulu, Februari 2022 Pihak Pertama		
		RUSTAM, SH. M.Si			MELIDAWATI, S.Sos		
		Pembina Tk. I			Penata Tk.1		
		NIP. 19721023 199703 1 004			NIP. 19780210 200502 2 002		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	an	: Pengawas Muda					
Tahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	Terlaksanar Pengawasar Keanggotaa Kabupaten/ Provinsi	n Koperasi yang Wilayah Innya Lintas Daerah			Penganalisisan penerapan peraturan perundang- undangan	15 Koperasi	
		Pihak Kedua RUSTAM, SH. M.Si			Bengkulu, Februari 2022 Pihak Pertama		
		Pembina Tk. I NIP. 19721023 199703 1 004			Penata Tk. I NIP. 19841027 201001 1 011		

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	in	: Pengawas Muda					
Tahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terlaksanan Pengawasar Keanggotaa Kabupaten/ Provinsi	n Koperasi yang Wilayah nnya Lintas Daerah	· ·		Perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi	15 Koperasi	-
		Pihak Kedua			Bengkulu, Februari 2022 Pihak Pertama		
		RUSTAM, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19721023 199703 1 004			ANTON NOFRIANSYAH, SE Penata Tk. I NIP. 19771130 200212 1 004		

OPD/L	Jnit Kerja Mandiri	: Dinas Koperasi, U	saha Kecil Dan Menengah Provinsi Ber	ngkulu				
Jabata	ın	: Perencana Ahli M	i Muda Subkoordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan					
Tahun	Anggaran	: 2022						
No	Sasaran	Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Target	Anggaran	
	Terlaksananya Per Penganggaran,dan Perangkat Daerah		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	75.000.000	
	T Crangate Dacran				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Kali	82.500.000	
					Bengkulu, Februari 2022			
				Bengkulu, Februari 2022				
		Pihak	Kedua	Pihak Pertama				
		Sekr	etaris	Perencana Ahli Muda				
		DEDY CANDO	A C CTD AA AD		FERRY MARYADI. SE.MM			
			A, S.STP.M.AP Ibina					
			9 199810 1 001	Penata Tk I NIP. 19790304 200804 1 002				
		1411 . 13000303	7 133010 1 001		1411 . 13730304 200804 1 002			

			Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata		: Kepala Sub-Bagian Umi	um dan Perlengkapan				
Tahun No	Anggaran	: 2022 an Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
140			· ·		•		
1		inistrasi Umum Perangkat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen Instalasi Listrik yang	Penyediaan Komponen Instalasi	25 Jenis	5.499.600
	Daerah			disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	27.500.100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	27,499,890
				James Baran Edgistik Kantor yang disediakan	Terryediadir barian bagistik kantor	20 301113	27.433.030
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan	12 jenis	10.999.800
				yang disediakan	Penggandaan		
				Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Buku	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	4 jenis	9.999.900
				Peraturan yang disediakan	Perundang-undangan		
				Jumlah Kunjungan Tamu yang di Fasilitasi	Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Kali	10.000.000
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Surat Masuk dan Surat Keluar Kedinasan	Penyediaan Surat Menyurat	2 Jenis	5.500.000
			rememitan baeran	** ***		40.0.1	474.000.000
				Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	174.999.656
				Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum dan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154 OB	368.259.200
				Teknis Perkantoran yang disediakan			
4		eliharaan Barang Milik Jrusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	30 Unit	16.500.000
	Daerah			Terdatanya Aset dan Jumlah Barang Milik Daerah SKPD	Penata Usahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.750.000
				Bucrum Skr b			
					Bengkulu, Februari 2022		
			Kedua		Pihak Pertama		
		Sekre	etaris		Kepala Sub-Bagian Umum		
		NUSIRWAN PERMA	ATA, S.Kom. M.Kom		ASLINI, S.Kom		
		Pembina	Tingkat I		Penata		
		NIP. 1970020	199803 1 009		NIP. 19790407 200701 2 022		

OPD/U	Unit Kerja Mandiri	: Dinas Koperasi, Usaha	Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu				
Jabata	an .	: Kepala Sub-Bagian Keu	angan				
Tahun	n Anggaran	: 2022					
No	Sasar	an Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terlaksananya Adı Perangkat Daerah	ministrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	9.202.137.720
				Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Jenis	72.460.000
				Jumlah Koordinasi penyusunan laporan triwulan SKPD yang dilaksanakan/ Jumlah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Kali/4 Laporan	16.500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Kali	110.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan pajak kendaraan yang dibayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26 Unit	170.000.000
				Bengkulu, Februari 2022			
		Pihak	Kedua		Pihak Pertama		
		Sekre	etaris		Kepala Sub-Bagian Keuangan		
		DEDV CANDO	A C CTD AA AD		VIIII NIIA DTI CE		
		DEDY CANDRA Pemi	A, S.STP, M.AP		YULI NIARTI, SE Penata Tk. I		
		NIP. 19800509			NIP. 19830530 200902 2 003		

)PD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
bata	n	: Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan					
ahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	Perkoperasia	, an Bagi Koperasi yang Wilayah ah Kabupaten/Kota dalam 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ditingkatkan Kapasitasnya Melalui	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	
					Beng	kulu, Februari	2022
		Pihak Kedua				Pihak Pertama	
	17	ANA KUSUMANINGTYAS, SE. M	<u>M</u>		2	YENI SULISTIANA, S	<u> </u>
		Pembina				Penata Tk. I	
		NIP. 19770908 200312 2 003			NIP.	19750125 201001	002

OPD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil D	an Menengah Provinsi Bengkulu				
abata	n	: Kepala Seksi Pengembangan I	Pelatihan				
ahun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	Perkoperasia	, an Bagi Koperasi yang Wilayah ah Kabupaten/Kota dalam 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ditingkatkan Kapasitasnya Melalui	-Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum dan silabus -Menyiapkan bahan pengembangan modul dan media pembelajran -Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD		
					Beng	kulu, Februari	2022
		Pihak Kedua				Pihak Pertama	
	<u>IX</u>	/ANA KUSUMANINGTYAS, SE. M	<u>M</u>			Ir. NELLY FEBRIDAR	
		Pembina NIP. 19770908 200312 2 003			NIP.	Penata Tk. I 19690227 200312 2	001

PD		: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan	Menengah Provinsi Bengkulu				
bata	n	: Kepala Sub-Bagian Tata Usaha					
hun	Anggaran	: 2022					
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
		an Bagi Koperasi yang Wilayah h Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-Pelaksanaan penghimpunan data, penyusunan/penyampaian Laporan kegiatan -Pelaksanaan katatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian -Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan		
		Pihak Kedua			Beng	kulu, Februari 2 Pihak Pertama	2022
	Į.	IVANA KUSUMANINGTYAS, SE. MM	1			Dra. ROSLAINI	
		Pembina				Penata Tk. I	
		NIP. 19770908 200312 2 003			NIP.	19650715 198701 2	002

Tahun	Anggaran	: 2022						
No		Sasaran Kegiatan	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
	dengan Orie	ya Pengembangan Usaha Kecil ntasi Peningkatan Skala Usaha ha Menengah		Skala Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkar ISkalanya menjadi Usaha Menengah	-Pelaksanaan pengembangan jejaring bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah -Pelaksanaan penyediaan layanan informasi dan pustaka entrepreneur bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah -Pelaksanaan koordinasi promosi dan pemasaran produk daerah	100 UMKM	-
		1						
		Pihak Kedua				Benį	gkulu, Februari Pihak Pertama	2022
		Pillak Kedua					Pillak Pertallia	

OPD Jabatan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu : Kepala Seksi Promosi Dan Pemasaran

	ELDA RAKHMAWATI, SH			AS	TI PUSPITA SARI, S.S	Sos
	Pembina				Penata Tk. I	
	NIP. 19661215 199403 2 006			NIP. 19861012 201001 2 001		001
OPD	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan	Menengah Provinsi Bengkulu				
OPD Jabatan	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan : Kepala Sub-Bagian Tata Usaha	Menengah Provinsi Bengkulu				
		Menengah Provinsi Bengkulu				

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil		Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan	-Pelaksanaan penghimpun data,	100 UMKM	-
	dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha		Skalanya menjadi Usaha Menengah	penyusunan/penyampaian laporan		
	Menjadi Usaha Menengah	Menjadi Usaha Menengah		kegiatan		
		!		-Pelaksanaan Ketatausahaan, administrasi		
		!		keuangan dan kepegawaian		
		!		-Pelaksanaan urusan rumah tangga dan		
		!		perlengkapan		
		!				
				Beng	kulu, Februari 20	022
	Pihak Kedua				Pihak Pertama	
	ELDA RAKHMAWATI, SH			<u>EKA</u> I	NENENG SULASIH, S.S	ios
	Pembina				Penata Tk. I	
	NIP. 19661215 199403 2 006			NIP.	19840421 200901 2 0	16

OPD	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu							
Jabata	atan : Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dan Pengembangan KUMKM							
Tahun	Anggaran : 2022							
No	Sasaran Keg	iatan	Kegiatan		Indikator Kegiatan	Sub.Kegiatan	Target	Anggaran
-1	Terlaksananya Pengemb					Produksi dan		

Pihak Kedua

ELDA RAKHMAWATI, SH Pembina NIP. 19661215 199403 2 006 Bengkulu, Februari 2022 Pihak Pertama

HARDIAN DINATA, SE. MM
Penata Tk. I
NIP. 19780207 200701 1 019

1	6
_	U

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur adalah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dan pengukurannya disajikan dalam perbandingan antara target setiap indikator dengan realisasi capaian.

I. Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dalam

Rangka Pencapaian Pemerintahan yang Baik dan Bersih

(Good and Clean Government)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor

Tabel 3.1.1 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor

			Target	Real	Skor		
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022	
1	Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	Kategori	ВВ	В	ВВ	70,15	

Analisa:

- a. Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu belum optimal karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu baru terbentuk setelah Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tahun 2018.
- Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Bengkulu yaitu BB dengan nilai 70,15

II. Tujuan II : Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tabel 3.1.2 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran 1. Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	Target 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB	%	5,7	43	44	748

Analisa:

Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 meningkat drastis sebesar 44% dari target yang diproyeksikan sebesar 5,7%, sementara realisasi target kinerja pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 44%. Peningkatan signifikan pada pertumbuhan sektor koperasi terhadap PDRB tahun 2022 tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah koperasi dengan total sebanyak 2.869 unit pada tahun 2022, dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2021 sebanyak 2.825. Dengan demikian terdapat peningkatan jumlah unit koperasi sebesar 44 unit dan peningkatan nilai modal luar, SHU dan aset koperasi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Kebangkitan perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2022 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap total nilai ekspor dengan peningkatan nilai ekspor sebesar 150% (didominasi oleh ekspor cangkang sawit dan batu bara) dan berkurangnya total nilai impor Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022.

Tabel 3.1.3 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran 2. Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB

			Target	Realisasi		%	
	No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
	1	Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB	%	5,7	7	6	103

Analisa:

Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 meningkat sebesar 6% dari target yang diproyeksikan sebesar 5,7%, turun tipis dari realisasi tahun 2021 sebesar 7% akibat nilai impor yang turun drastis sepanjang tahun 2022. Peningkatan signifikan pada pertumbuhan sektor UMKM terhadap PDRB tahun 2022 tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah investasi sebesar 440%, ekspor dan konsumsi rumah tangga Pemerintah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Kebangkitan perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2022 pasca Pandemi Covid 19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Pertumbuhan Sektor UMKM.

Tabel 3.1.4 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran 3. Kontribusi Sektor Koperasi Terhadap PDRB

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Kontribusi Sektor Koperasi Terhadap PDRB	%	5,2	5	7,2	138

Analisa:

Kontribusi Sektor Koperasi terhadap PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mengalami kenaikan angka persentase realisasi sebesar 7,2% jika dibandingkan dengan angka persentase target sebesar 5,2% dan naik 2,2% dibanding tahun 2021. PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.268.042.800.000,- terhadap PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2021 atau tumbuh sebesar 11,6%. Salah satu variabel peningkatan nilai dan pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu adalah dari sektor Koperasi dan UMKM.

Tabel 3.1.5 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran 4. Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB	%	20	18	17	85

Analisa:

Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB Provinsi Bengkulu pada 2022 menunjukkan angka realisasi sebesar 17% hampir mendekati target dan proyeksi tahun 2022 sebesar 20%, turun tipis terhadap realisasi tahun 2021 sebesar 18%. Capaian kinerja indikator sasaran Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 sebesar 85%, belum sepenuhnya tercapai karena meningkatnya PDRB Provinsi Bengkulu dari sektor lain yang berdampak pada berkurangnya perhitungan kontribusi total dari sektor UMKM.

Tabel 3.1.6 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja 5. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	8	16,6	12,9	161

Analisa:

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi pada tahun 2022 meningkat drastis sebesar 16,6% dari target yang diproyeksikan sebesar 8%. Peningkatan signifikan Volume Usaha Koperasi pada tahun 2022 tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah koperasi dengan total sebanyak 2.869 unit pada tahun 2022, dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2021 sebanyak 2.825. Dengan demikian terdapat peningkatan jumlah unit koperasi sebesar 44 unit. Kebangkitan Sektor Koperasi pasca Pandemi Covid 19 ikut mendorong peningkatan nilai dan pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu dari sektor koperasi.

Tabel 3.1.7 Indikator Sasaran Eselon II Indikator Kinerja Sasaran 6. Pertumbuhan Koperasi Modern

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Pertumbuhan Koperasi Modern	%	0,2	0,14	N/A	N/A

Analisa:

Jumlah Koperasi di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 2.869 koperasi dari total Nasional sebanyak 130.290 atau berkontribusi sebanyak 2,2% terhadap jumlah koperasi di Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI pada tahun 2020-2024 menargetkan tercapainya 500 Koperasi Modern (0,38% dari total Koperasi secara Nasional), dengan demikian Provinsi Bengkulu harus menargetkan kontribusi terhadap pencapaian Koperasi Modern sebanyak 11 Koperasi Modern di Provinsi Bengkulu (2,2% dari total Koperasi di Provinsi Bengkulu). Pertumbuhan Koperasi Modern di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022 belum dapat disajikan dari target yang diproyeksikan sebesar 0,2% karena keterbatasan data pendukung dan hasil pendataan di Kabupaten/Kota. Hasil inventarisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) menunjukkan bahwa jumlah koperasi modern dengan kategori terkoneksi dengan digitalisasi, mempunyai inovasi, terkoneksi dengan multipihak serta menjadi rujukan bagi koperasi lain sebagai percontohan koperasi modern belum tumbuh sepanjang tahun 2022. Beberapa kendala dalam membangun koperasi modern disebabkan oleh sulitnya koperasi bertransformasi dan berinovasi karena keterbatasan pembiayaan, minimnya SDM yang mumpuni serta dikelola dengan cara konvensional.

Tabel 3.1.8 Indikator Sasaran Eselon II
Indikator Kinerja Sasaran 7. Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertranformasi dari Informal ke Formal

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	%	4	18,64	47	1175

Analisa:

Data total Usaha Mikro di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 adalah sebanyak 147.206 Usaha Mikro. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), mewajibkan setiap pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan untuk melakukan pendaftaran atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Lembaga OSS selaku penerbit Perizinan Berusaha. Usaha Mikro informal dapat bertransformasi menjadi Usaha Mikro Formal dengan mendaftarkan usahanya kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB. Sampai dengan tahun 2021 menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu dan data OSS RBA, tercatat 20.890 Usaha Mikro dan Kecil yang telah memiliki NIB. Jumlah Usaha Mikro Kecil yang memiliki NIB tahun 2021 ini tumbuh

18,64% jika dibandingkan jumlah Usaha Mikro Kecil pada tahun 2020. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan Pemerintah, maka pada tahun 2022 terdapat peningkatan signifikan jumlah Usaha Mikro Kecil yang telah mengurus NIB sebanyak 18.990 UMK dari total 39.880 UMK yang telah memiliki NIB sampai dengan tahun 2022. Dengan demikian pertumbuhan Usaha Mikro Informal yang bertransformasi menjadi Usaha Mikro Formal tahun 2022 terhadap tahun 2021 adalah sebesar 47%, jauh melampaui target yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 4%.

Tabel 3.1.9 Indikator Sasaran Eselon II Indikator Kinerja 8. Pertumbuhan Omzet UMKM

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian 2022
1	Pertumbuhan Omzet UMKM	%	3	0	0,01	0,33

Analisa:

Pertumbuhan Omzet UMKM tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tumbuh tipis sebesar 0,01%. Realisasi pertumbuhan omzet UMKM pada tahun 2021 sebesar Rp.17.756.041.775.000,- sedangkan realisasi pertumbuhan omzet UMKM pada tahun 2022 sebesar Rp.17.758.356.825.000,- berdasarkan Online Data System (ODS) sebagai Database UMKM. Target sebesar 3% pada tahun 2022 belum dapat direalisasikan karena keterbatasan sumber data sebagai implikasi program pendataan ulang UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM. Program pendataan ulang (SIDT) yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi UKM RI ini menjadi Data Base Tunggal dalam Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM di seluruh Provinsi. Proses pendataan terus berlangsung untuk 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023, sementara 3 (tiga) Kabupaten/Kota telah terdata sebanyak 83.523 UMKM pada tahun 2022.

Tabel 3.2.1 Indikator Sasaran Eselon III Indikator Kinerja Sasaran 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor

			Target	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 100%					

Tabel 3.2.2 Indikator Sasaran Eselon III
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Koperasi

			Target	Real	isasi	%
No	Uraian	Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi	%	80	66	66	82,5
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan Provinsi	%	100	100	100	100
3	Persentase Koperasi binaan Provinsi dan UMKM yang dididik dan dilatih	%	100	100	100	100
4	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	%	100	100	100	100
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 95,6 9	%				

Tabel 3.2.2 Indikator Sasaran Eselon III
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas UMKM

			Target 2022	Realisasi		%
No	Uraian	Satuan		2021	2022	Capaian 2022
1	Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	%	0,10	0,10	0,17	170
2	Persentase Pengembangan UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu	%	10	10	25,6	256
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 213 %	6				

Tabel 3.3.1 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator
Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Uraian	Satuan	Target 2022	Real	%	
No				2021	2022	Capaian 2022
1	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jenis	2	2	2	100
2	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	2	3	100

3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	100
4	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	6	7	100
5	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Jenis	1	1	1	100
6	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jenis	3	3	3	100
7	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jenis	3	3	3	100
Pers	Persentase Capaian Sasaran ini adalah 100 %					

Tabel 3.3.2 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator

Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

	Uraian		Target	Real	%	
No		Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Binaan Provinsi	Rekomendasi Perizinan	15	10	10	66
Pers	Persentase Capaian Sasaran ini adalah 66%					

Tabel 3.3.3 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator

Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

	Tar		Target	Real	isasi	%
No	Uraian	Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang diperiksa dan diawasi	Unit Usaha	15	15	15	100
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 100 %	•				

Tabel 3.3.4 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

	Uraian		Target	Real	%	
No		Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Jumlah anggota koperasi binaan Provinsi yang ditingkatkan kapasitas SDM nya melalui Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Orang	600	800	810	135
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 135 %					

Tabel 3.3.5 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator
Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

	Uraian		Target	Real	Realisasi		
No		Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022	
1	Jumlah anggota UKM binaan Provinsi yang ditingkatkan kapasitas SDM nya melalui Pendidikan dan Pelatihan UKM	Orang	50	0	180	360	
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 360 %						

Tabel 3.3.6 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

	No Uraian Satuan		Target	Real	%	
No		2022	2021	2022	Capaian 2022	
1	Jumlah Koperasi binaan Provinsi yang diberdayakan dan dilindungi	Koperasi	15	15	83	553
Pers	Persentase Capaian Sasaran ini adalah 553 %					

Tabel 3.3.7 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator

Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

	No Uraian Satuan		Target	Real	%	
No		Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Jumlah Usaha Kecil yang didampingi dan diberdayakan	Unit Usaha	100	100	171	171
Pers	Persentase Capaian Sasaran ini adalah 171 %					

Tabel 3.3.8 Indikator Sasaran Eselon IV/SubKoordinator
Indikator Kinerja Sasaran 1. Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

			Target	Real	%	
No	Uraian	Satuan	2022	2021	2022	Capaian 2022
1	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia serta Desain Teknologi	Unit Usaha	50	50	128	256
Pers	entase Capaian Sasaran ini adalah 256 %	•				

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2020 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tanggal 17 Nopember 2022 tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, maka proses perizinan Usaha Simpan Pinjam dihentikan sepanjang tahun 2020-2022. Moratorium ini dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Usaha Simpan Pinjam Koperasi termasuk kedalam risiko tinggi yang memerlukan pertimbangan kelayakan modal dalam berusaha;
- 2. Bahwa masih banyak ditemukan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan Pinjam namun tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar Koperasi serta ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan keresahan dan menyebabkan citra Koperasi menjadi kurang baik di mata masyarakat;

3. Kementerian Koperasi dan UKM RI sedang merumuskan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI yang akan mengatur lebih lanjut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tabel 3.3.2 dengan Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi menunjukkan persentase capaian pada sasaran dimaksud hanya berkisar 66%. Menurunnya Capaian Sasaran Kinerja tersebut disebabkan Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi sepanjang tahun 2020-2022.

Untuk memenuhi target pencapaian sasaran kinerja dimaksud, maka pendampingan, fasilitasi dan rekomendasi perizinan usaha simpan pinjam menjadi tugas utama Bidang/Seksi yang mengemban Tugas Pokok dan Fungsi dalam Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam. Hal tersebut mempertegas bahwa hingga tahun 2022 Penerbitan/ Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi bukan menjadi otoritas Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi namun menjadi Otoritas Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan/ atau Otoritas Pengawas Koperasi yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 guna mencapai Target Sasaran yang telah ditetapkan, adalah:

- a. APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2022 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 19.139.828.209, dengan realisasi serapan sebesar Rp. 18.348.127.320,38,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar **95,86%**.
- b. Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2022 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 4.622.797.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp. 4.520.227.027,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 97,78%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Total Anggaran yang dialokasikan dan dikelola pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp. Rp. 19.139.828.209,-dengan realisasi serapan sebesar Rp. 18.348.127.320,38,- (95,86%). Sedangkan alokasi Anggaran Program/Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp.4.622.797.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp. 4.520.227.027,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 97,78%.

B. Saran-saran

Upaya pencapaian Target Kinerja dari Sasaran Strategis pada masa yang akan datang dapat lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan antara lain :

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
- Meningkatkan kualitas dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) hingga ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui evaluasi secara berkala sehingga dapat berjalan secara selaras dan terukur;
- c. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Penetapan dan penunjukan Pelaksana Kegiatan diusahakan sesuai dengan bidang dan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, dengan harapan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi optimalnya dokumen ini.

REKAP	ITULASI CAPA	IAN KINER	RJA		
Uraian/ Indikator Sasaran	Satuan	Target	Real	lisasi	Canaian
Oralany markator Sasaran	Satuan	2022	2021	2022	Capaian
Eselon II : I. Meningkatnya Kualitas Tata					
Kelola Pemerintahan					
dalam Rangka Pencapaian					
Pemerintahan yang Baik					
dan Bersih (Good and					
Clean Government)					
II. Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM					
dalam Mendukung					
Pertumbuhan Ekonomi					
Daerah					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor	Kategori	ВВ	В	ВВ	70,15
2. Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap		F 7	42	4.4	
PDRB	Persen	5,7	43	44	748
Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB	Persen	5,7	7	6	103
4. Kontribusi Sektor Koperasi Terhadap PDRB	Persen	5,2	5	7,2	138
5. Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB	Persen	20	18	17	85
6. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	8	16,6	12,9	161
7. Pertumbuhan Koperasi Modern	Persen	0,2	0,14	N/A	N/A
8. Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertranformasi dari Informal ke Formal	Persen	4	18,64	47	1175
9. Pertumbuhan Omzet UMKM	Persen	3	0	0,01	0,33
Eselon III: Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100
yang dilaksanakan Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan,					
Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja	Jenis	2	2	2	100
Perangkat Daerah yang disusun					
Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	2	3	100
3. Jumlah Dokumen Administrasi Barang	Dokumen	1	1	1	100
Milik Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	100
Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	6	7	100
5. Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	Jenis	1	1	1	100
6. Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jenis	3	3	3	100
7. Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jenis	3	3	3	100
Eselon III : Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi	Persen	80	66	66	82,5
Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Binaan Provinsi	Rekomendasi Perizinan	15	10	10	66
Eselon III : Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan	Persen	100	100	100	100
Provinsi					
Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang diperiksa dan diawasi	Unit Usaha	15	15	15	100

Eselon III : Persentase Koperasi binaan Provinsi dan UMKM yang dididik dan dilatih	Persen	100	100	100	100
Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah anggota koperasi binaan Provinsi yang ditingkatkan kapasitas SDM nya melalui Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Orang	600	800	810	135
Jumlah anggota UKM binaan Provinsi yang ditingkatkan kapasitas SDM nya melalui Pendidikan dan Pelatihan UKM	Orang	50	0	180	360
Eselon III : Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Persen	100	100	100	100
Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah Koperasi binaan Provinsi yang diberdayakan dan dilindungi	Koperasi	15	15	83	553
Eselon III : Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	0,10	0,10	0,17	170
Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah Usaha Kecil yang didampingi dan diberdayakan	Unit Usaha	100	100	171	171
Eselon III : Persentase Pengembangan UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu	Persen	10	10	25,6	256
Eselon IV/Sub Koordinator					
Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumberdaya Manusia serta Desain Teknologi	Unit Usaha	50	50	128	256

Bengkulu, Februari 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

ERDIWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19680714 199303 1 005

REKAPITULASI CAPAIAN KEUANGAN (APBD) TAHUN 2022

	REKAPITULASI CAPAIAN KEUANGAN (APB	I TAITON ZUZZ	REALISASI		
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.473.837.209	11.243.443.159	97,99	97,99
	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.500.000	152.703.688	96,95	96,95
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	57.300.000	95,50	95,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.500.000 8.696.699.063	95.403.688 8.582.255.580	97,85 98,68	97,85 98,68
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.539.529.063	8.427.620.580	98,69	98,69
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.670.000	139.200.000	98,96	98,96
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	16.500.000	15.435.000	93,55	93,55
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.750.000	13.207.000	96,05	96,05
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.750.000	13.207.000	96,05	96,05
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.877.290	333.356.497	99,25	99,25
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.499.600	5.350.000	97,28	97,28
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.500.000	27.416.050	99,69	99,69
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.499.890	27.194.000	98,89	98,89
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.999.800	109.700.000	98,83	98,83
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.999.900	9.600.000	96,00	96,00
<u> </u>	7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.800.000	98,00	98,00
	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.378.100	144.296.447	99,94	99,94
<u> </u>	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.240.000	286.919.613	96,85	96,85
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.240.000	286.919.613	96,85	96,85
<u> </u>	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.758.856	503.035.109	84,72	84,72
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	4.345.000	79,00	79,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.999.656	109.425.782	62,53	62,53
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.259.200	389.264.327	94,19	94,19
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.380.012.000	1.371.965.672	99,42	99,42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.512.000	174.812.000	96,31	96,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	16.280.000	98,67	98,67
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.182.000.000	1.180.873.672	99,90	99,90
п	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	200.000.000	178.590.600	89,30	89,30
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000	178.590.600	89,30	89,30
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000	178.590.600	89,30	89,30
III	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	231.660.000	221.800.441	95,74	95,74
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	231.660.000	221.800.441	95,74	95,74
	 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 	131.660.000	126.123.801	95,80	
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan	100.000.000	95.676.640	95,68	95,68
IV	Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.984.331.000	2.891.309.482	96,88	96,88
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah			,	
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.534.331.000	2.495.517.482	98,47	98,47
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.534.331.000	2.495.517.482	98,47	98,47
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM BagiUKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	450.000.000	395.792.000	87,95	87,95
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	450.000.000	395.792.000	87,95	87,95
٧	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	550.000.000	538.540.254	97,92	97,92
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	550.000.000	538.540.254	97,92	97,92
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	550.000.000	538.540.254	97,92	97,92
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN MIKRO (UMKM)	2.025.000.000	1.754.168.416	86,63	86,63
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.025.000.000	1.754.168.416	86,63	86,63
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga 1 dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.025.000.000	1.754.168.416	86,63	86,63
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.675.000.000	1.520.274.968,38	90,76	90,76
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.675.000.000	1.520.274.968,38	90,76	90,76
	1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1.675.000.000	1.520.274.968,38	90,76	90,76
	JUMLAH	19.139.828.209	18.348.127.320,38	95,86	95,86
Щ_	Sica Lobib Porbitungan Anggaran T A 2022: Pp. 791 700 888 62	.555.626.203	. 5.5 .527 .520,50	55,50	50,50

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T.A 2022: Rp. 791.700.888,62,-

Mengetahui, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

REKAPITULASI CAPAIAN KEUANGAN (APBN/DEKONSENTRASI) TAHUN 2022

			REALISASI			
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
I	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4.622.797.000	4.520.227.027	97,78	97,78	
	Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	224.645.000	223.039.883	99,29	99,29	
	Kegiatan Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	612.972.000	601.496.434	98,13	98,13	
	Kegiatan Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian	2.398.900.000	2.365.515.710	98,61	98,61	
	Kegiatan Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	1.386.280.000	1.330.175.000	95,95	95,95	
	JUMLAH	4.622.797.000	4.520.227.027,00	97,78	97,78	

Mengetahui, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

> Erdiwan, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP.19680714 199303 1 005